

6 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1 Kerjasama Antar Daerah

6.1.1 Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Provinsi Jambi melaksanakan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerja antar daerah dalam berbagai sektor pembangunan daerah.

Adapun kebijakan kerjasama antar daerah di Provinsi Jambi dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun rencana lainnya.

6.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, merupakan lanjutan kerjasama yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya baik berupa kerjasama regional maupun kerjasama antar provinsi untuk sektor tertentu. Kerjasama – kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera pada tahun 2014 dilaksanakan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam forum tersebut, para Gubernur se-wilayah Sumatera bersepakat untuk:
 - a. Mendorong pemerintah daerah menuju kemandirian dan keamanan pangan.
 - b. Mendorong peran pemerintah dan swasta untuk membangun kawasan industri hilir sesuai potensi daerah
 - c. Menetapkan pelaksanaan “Visit Sumatera 2015”

- d. Mendorong semua provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sumatera untuk melakukan kerjasama pengembangan ekonomi;
- e. Memperkuat manajemen pengelolaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing Provinsi dalam penanggulangan bencana, khususnya bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan;
- f. Mendukung Provinsi Aceh dan/atau Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2020.

Selain kesepakatan kesepakatan di atas, mengingat pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemilihan Presiden dan selanjutnya disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, maka melalui forum gubernur se Sumatera ini juga telah disepakati beberapa usulan regional Sumatera untuk diakomodir dalam RPJMN 2015-2019, terutama terkait penyediaan infrastruktur jalan tol, kereta api dan pelabuhan laut. Pada forum tahun 2014 ini juga telah disepakati beberapa langkah yang akan dilaksanakan terkait masalah penyertaan modal provinsi se Sumatera pada PT. Sumatera Shipping Lines, PT. Riau Airlines dan PT. Sumatera Promotion Centre. Provinsi Jambi yang ditunjuk sebagai koordinator kerjasama dengan PT. Sumatera Shipping Lines telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi permasalahan penyertaan modal dengan melakukan koordinasi dan pembicaraan dengan pihak PT. Sumatera Shipping Lines. Telah disepakati pada awal tahun 2015 akan diselenggarakan rapat lengkap antara pemerintah Provinsi se Sumatera dengan jajaran direksi PT. Sumatera Shipping Lines menyangkut penyelesaian dan kelanjutan penyertaan modal. Hasil dari kesepakatan tersebut akan disampaikan pada Forum Gubernur se Sumatera Tahun 2015 yang diselenggarakan pada Bulan Maret 2015 di Banda Aceh Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam.

- 2) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dalam hal pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata. Perjanjian kerjasama ini telah ditandatangani pada tahun 2011 lalu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tahun 2014 merupakan tahun ketiga implementasi perjanjian tersebut. Sepanjang tahun 2014, kegiatan yang menjadi agenda utama kerjasama Selat Karimata adalah pematangan kesiapan keempat provinsi dalam menggelar event Sail Selat

Karimata. Dengan telah ditetapkannya Selat Tomini Sulawesi sebagai penyelenggara Sail Indonesia Tahun 2015 oleh pemerintah, maka event Sail Selat Karimata diusulkan kembali untuk dapat diselenggarakan pada tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut keempat provinsi kembali menyampaikan usulan ke pemerintah pusat agar event Sail Selat Karimata dapat diselenggarakan pada tahun 2016, dengan lokasi puncak acara diusulkan di Kepulauan Anambas Kepulauan Riau dan Kepulauan Karimata Kalimantan Barat. Disepakati pula bahwa pelaksanaan visit direncanakan selama satu tahun di empat provinsi.

Fokus utama penyelenggaraan Sail Selat Karimata adalah pengembangan daerah tertinggal di kawasan pesisir melalui optimalisasi potensi pariwisata. Oleh karena itu diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) saling bahu-membahu menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Surat dukungan dan proposal kepada kementerian/ lembaga terkait untuk pelaksanaan rencana tersebut telah disiapkan dan dikirimkan pada awal tahun 2014 dan diharapkan pada awal tahun 2015 para gubernur dapat melakukan presentasi/audiensi dengan kementerian untuk meloloskan pelaksanaan Sail Selat Karimata 2016.

Untuk mendukung rencana pelaksanaan Visit and Sail Selat Karimata Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jambi sendiri telah melaksanakan beberapa kali rapat dengan mengundang pihak-pihak terkait, khususnya pihak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, serta menghadiri beberapa kali pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu melalui Dinas Pariwisata Provinsi Jambi juga telah dilaksanakan kegiatan survei titik labuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil bahwa perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang 12 Mil Laut dianggap tidak layak untuk dijadikan titik labuh karena adanya pendangkalan. Namun demikian permasalahan ini dapat diatasi dengan melakukan pengerukan. Mengingat anggaran pengerukan laut ini cukup besar, maka telah diusulkan kegiatan pengerukan ke Kementerian Perhubungan agar dapat dilaksanakan pada tahun 2015 atau awal 2016.

- 3) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah masing-masing untuk dapat dipasarkan di kedua daerah. Di samping itu diharapkan juga ada alih teknologi dan pengetahuan antar daerah. Proses kerjasama ini pada tahun 2014 baru pada proses penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur Jambi dengan Gubernur Jawa Timur dan proses peninjauan perjanjian kerjasama antar SKPD masing-masing provinsi. Proses peninjauan ini telah diawali dengan kunjungan delegasi Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari utusan beberapa SKPD ke Provinsi Jambi pada pertengahan tahun 2014. Untuk tahap awal akan dilakukan peninjauan kerjasama yang meliputi 7 (tujuh) Sektor/bidang, yaitu Energi dan Sumber Daya Mineral; Kehutanan; Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Perindustrian dan Perdagangan; Peternakan dan Kesehatan Hewan; Pariwisata; dan Perkebunan.
- 4) Kerjasama pembangunan wilayah perbatasan antara Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Kerjasama ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menggali berbagai potensi kerjasama pengembangan wilayah perbatasan, khususnya terkait penyediaan fasilitas pelayanan publik, sekaligus untuk meminimalisir potensi konflik antar masyarakat di wilayah perbatasan. Pada tahun 2014 proses kerjasama ini baru pada tahap inisiasi dan diharapkan pada tahun 2015 sudah diperoleh kesepakatan baik antar provinsi maupun antar kabupaten lintas provinsi.
- 5) Kerjasama Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kerjasama ini merupakan bagian dari program kerja pengelolaan DAS Batanghari yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi (Sumatera Barat dan Jambi). Mengingat pentingnya keberadaan sungai Batanghari, baik sebagai sumber air baku, sumber pendapatan, sekaligus jalur transportasi, maka diharapkan melalui kerjasama ini dapat diwujudkan pelestarian sungai batanghari termasuk wilayah Daerah Aliran Sungai-nya. Kerjasama ini merupakan kerjasama lanjutan tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2014, telah disepakati proses revisi Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua provinsi.

6.1.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antar daerah untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera belum optimal dalam pelaksanaan implementasinya. Hal ini disebabkan oleh belum adanya badan kerjasama khusus yang menangani atau melaksanakan hasil kesepakatan tersebut dan masih dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah belum terlalu fokus melaksanakan hasil kesepakatan karena tidak semua daerah memiliki fokus pembangunan yang sama, sehingga lebih mendahulukan agenda pembangunannya masing-masing. Permasalahan yang sama juga terjadi pada implementasi kerjasama tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata.

Solusinya adalah pelaksanaan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu untuk memonitoring dan mengevaluasi progress pelaksanaan kesepakatan.

2. Dukungan APBD Provinsi Jambi terhadap pengelolaan Sumberdaya pesisir, Kelautan dan Perikanan belum optimal, sehingga masih banyak potensi yang belum tergali dan memberikan dampak yang signifikan, baik bagi masyarakat sekitar maupun perekonomian Provinsi Jambi sendiri secara umum. Salah satu solusi yang mharus dikembangkan adalah pelibatan dan integrasi program dan kegiatan Kabupaten yang berada pada kawasan pesisir, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur untuk ikut berperan aktif dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata. Sementara itu untuk menghadapi rencana penyelenggaraan Sail Selat Karimata 2016, juga masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama kesiapan lokasi dan infastruktur pendukung yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Oleh karena itu keterpaduan program dan kegiatan sangat diperlukan, terutama pendanaan yang spesifik menyebut pelaksanaan program Sail Selat Karimata 2016 di Provinsi Jambi.

6.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

6.2.1 Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan kerjasama daerah antara Provinsi Jambi dengan pihak ketiga dilaksanakan untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal Provinsi Jambi, penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan publik dengan melibatkan dunia usaha, serta perluasan pengembangan investasi dalam rangka percepatan peningkatan perekonomian daerah. Secara umum kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah implementasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat para pihak pada tahun sebelumnya. Ada cukup beragam pihak ketiga yang menjadi subjek kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi, baik dari lembaga pemerintah tingkat pusat, Badan Usaha Milik Negara, lembaga asing, perguruan tinggi hingga swasta murni.

6.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak ketiga yang dijalin selama tahun 2014 cukup banyak, khususnya yang terkait dengan kerjasama perencanaan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan beberapa perguruan tinggi baik dari dalam daerah maupun luar daerah maupun lembaga-lembaga profit. Untuk kerjasama yang berskala lebih besar dan lebih luas yang dijalin oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak ketiga pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Lembaga Wali Amanat Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* (MCAI) dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Kerinci tentang Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity Project*). Kerjasama ini merupakan perluasan kerjasama, dimana pada tahun 2012-2013 telah ditandatangani pula perjanjian kerjasama sejenis dengan lokasi adalah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi. Proyek green prosperity ini adalah salah satu kegiatan dalam program compact yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, dan

meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan cara memperbaiki kegiatan pemanfaatan lahan serta pengelolaan sumber daya alam. Pada tahun 2014 progres kegiatan kerjasama ini adalah proses penyampaian usulan/proposal kegiatan oleh seluruh pemerintah kabupaten kepada MCAI untuk dinilai kelayakannya sesuai dengan criteria yang telah disepakati sebelumnya.

- 2) Perjanjian kerja sama pengembangan Kebun Binatang Taman Rimba yang terintegrasi dengan Bandara Sultan Thaha Jambi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Angkasa Pura II. Pada prinsipnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk integrasi kawasan ini dengan konsep berupa ZOO Airport. Untuk tahap awal telah disepakati pihak PT. Angkasa Pura II yang akan menyiapkan Masterplan. Dalam perjanjian kerjasama juga telah dituangkan tentang pemanfaatan lahan asset Pemerintah Provinsi Jambi untuk dijadikan lahan parkir dan tempat usaha mikro (pondok kuliner dan perdagangan).
- 3) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Ombudsman tentang pembentukan lembaga independent untuk wilayah Jambi dalam rangka pelayanan publik. Perjanjian kerjasama ini merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
- 4) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Keuangan tentang pertukaran data, peraturan, Bimtek/pelatihan, narasumber dan informasi lainnya terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah di wilayah Provinsi Jambi. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi pengelolaan keuangan negara dan daerah sekaligus peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Kerja sama pembangunan Pasar Angso Duo Baru, antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Eraguna Bumi Nusa. Sampai saat ini pembangunan Pasar Angso Duo masih dalam proses penyiapan lahan. Mengingat kondisi Pasar Angso Duo lama yang sudah sangat kurang memadai, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban, maka diharapkan proses pembangunan Pasar Angso Duo baru ini

dapat segera direalisasikan sesuai target perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

- 6) Kerjasama pengelolaan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Fuhai Group. Kerjasama ini masih dalam tahap *Memorandum of Understanding (MoU)*, dimana PT. Fuhai Group menyatakan minat mereka untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Ujung Jabung dan pada tahun 2014 masih dalam tahap peninjauan dan penyiapan rencana.
- 7) Rencana pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan pelabuhan dan investasi dengan North Port Klang Malaysia. Rencana kerjasama ini merupakan tindak lanjut atas kunjungan kerja BPMD dan PPT Provinsi Jambi ke North Port Klang pada akhir 2014. Pengembangan kerjasama ini dimaksudkan salah satunya terkait dengan rencana pengembangan pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung. Diharapkan kerjasama ini dapat terwujud, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi bisa memperoleh banyak pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan pelabuhan dan kawasan ekonomi Ujung Jabung, mengingat North Port Klang merupakan salah satu pelabuhan dan kawasan ekonomi yang sudah cukup maju di kawasan Asia.

6.2.3 Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ditemukan permasalahan berarti dalam kerjasama-kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak ketiga. Hal yang perlu menjadi perhatian penting adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Jambi dapat memanfaatkan kerjasama ini dengan lebih optimal, sehingga dampak positif yang diharapkan sebagaimana maksud dan tujuannya dapat dicapai dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Untuk kerjasama yang berdampak luas, khususnya yang melibatkan masyarakat, kiranya perlu dilakukan perencanaan dan sosialisasi serta pendekatan-pendekatan yang lebih baik, sehingga implementasi dari kerjasama ini dapat terselenggara sesuai waktu dan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta makin kompleksnya kebutuhan fasilitas publik, kiranya Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota harus makin mengintensifkan kerjasama dengan pihak swasta (*public*

private partnership). Dari sisi kelembagaan, pada tahun 2014 juga telah dibentuk kembali Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dengan surat keputusan Gubernur. Diharapkan TKKSD ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kerja sama daerah khususnya, serta dapat menjadi katalisator dalam upaya pengembangan kerja sama daerah yang dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

6.3 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain dialokasikan dana dekonsentrasi (DK) dan dana tugas pembantuan (TP) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dialokasikan dana untuk instansi vertikal berupa dana kantor pusat (KP) dan dana kantor daerah (KD).

Melihat jumlah, luasnya cakupan penanganan dan besaran alokasi anggaran instansi vertikal di Provinsi Jambi yang lebih besar dari alokasi anggaran APBD Provinsi memperlihatkan kepada kita gambaran tentang besar dan banyaknya urusan yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di daerah, namun disisi lain apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masih terkendala dari sisi pendanaan serta kemampuan dan ketersediaan aparatur pelaksanaannya.

Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka koordinasi dengan instansi vertikal sebagai berikut:

6.3.1 Kepolisian Negara RI Daerah Jambi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dari tahun 2010 sampai tahun 2014 adalah a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya POLRIb) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur POLRI c) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur POLRI d) Program Pendidikan dan Latihan Aparatur POLRIe) Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia POLRI f) Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertibang) Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban h) Program Pemberdayaan Potensi Keamanani) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat j) Program Lidik Sidik Tindak Pidanak) Program

Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi) Program Pengembangan Hukum Kepolisian.

Adapun jumlah Pagu anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Pagu Anggaran dan Realisasi

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2010	362.942.662.000	371.557.623.669	102,37
2011	412.522.902.000	407.658.858.028	98,82
2012	429.705.096.000	466.539.521.266	108,57
2013	488.410.375.000	502.232.388.612	102,83
2014	555.569.953.000	548.291.986.615	98,69

6.3.2 Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi

Kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada beberapa kegiatan yang tersebar pada Kabupaten/Kota meliputi; kegiatan legalisasi aset yang mencakup aset prona, aset UKM, aset petani, aset transmigrasi, aset retribusi tanah, aset sertifikat BMN.

Realisasi pencapaian baik fisik maupun keuangan dari tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset Prona

Tahun	Jumlah Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2010	1.075.999.000	809.428.000	75,23
2011	1.880.000.000	1.363.714.000	72,54
2012	5.184.000.000	5.049.509.183	97,41
2013	11.908.800.000	11.586.773.500	97,30
2014	5.837.708.000	5.570.129.111	95,45

Tabel 6.3
Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset UKM

Tahun	Jumlah Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2010	400.000.000	353.991.295	88,50
2011	220.000.000	182.466.900	82,94
2012	360.000.000	357.404.000	99,28
2013	360.000.000	359.757.686	99,93
2014	230.666.250	220.761.220	95,71

Tabel 6.4
Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset Petani

Tahun	Jumlah Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2010	880.000.000	832.521.000	94,60
2011	560.000.000	497.249.460	88,79
2012	760.000.000	755.640.620	99,43
2013	600.000.000	599.597.147	99,93
2014	544.568.000	52.942.806	96,95

Tabel 6.5
Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset Nelayan

Tahun	Jumlah Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2010	-	-	-
2011	120.000.000	105.010.000	87,51
2012	120.000.000	109.905.000	91,59
2013	80.000.000	79.947.152	99,93
2014	-	-	-

Tabel 6.6
Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset Transmigrasi

Tahun	Jumlah Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2010	1.589.600.000	654.370.000	41,14
2011	2.980.000.000	1.460.617.000	49,01
2012	2.400.000.000	1.133.356.982	47,22
2013	800.000.000	339.547.000	42,44
2014	138.381.250	136.638.520	98,74

Tabel 6.7
Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset Retribusi Tanah

Tahun	Jumlah Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2010	2.400.000.000	1.423.749.501	59,32
2011	3.900.000.000	1.252.982.000	32,13
2012	3.000.000.000	2.587.248.000	86,24
2013	3.600.000.000	3.344.668.750	92,91
2014	2.314.137.000	1.964.140.050	84,88

Tabel 6.8
Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset Sertifikat BMN

Tahun	Jumlah Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	-	-
2014	143.850.000	123.731.800	86,01

Berikut beberapa permasalahan yang terdapat dalam capaian kinerja, antara lain; revisi DIPA/POK menjadikan masa tunggu eksekusi di lapangan yang cukup lama, anggaran yang belum mencerminkan keadaan sesungguhnya di lapangan terutama transportasi lokal yang bervariasi, kurang didukung data base yang akurat, kurangnya kajian data yang komprehensif dari objek dan subjek di lapangan khususnya legalisasi aset lintas sektor sehingga sering terjadi perubahan lokasi, petugas yang terbatas baik jumlah maupun sumber daya, asih ditemui masyarakat penerima manfaat yang tidak

mampu membayar BPHTP, dan terlambatnya petunjuk teknis pelaksanaan pada awal tahun anggaran.

6.3.3 Universitas Jambi

Program dan kegiatan pada Universitas Jambi dari tahun 2010-2014 yaitu pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen pendidikan tinggi, penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa, peningkatan mutu prodi profesi kesehatan dan mutu pendidikan kesehatan, serta layanan tridharma di perguruan tinggi.

Tabel 6.9
Pag Anggaran Universitas Jambi

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2013	324.057.834.048	228.331.149.870	70,46
2014	330.452.137.067	248.235.645.364	75,12

Beberapa permasalahan antara lain: Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana penyedia bahan ajar dan sebagai penunjang PBM belum optimal, beberapa Prodi belum memiliki fasilitas pendukung pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium yang memadai, diseminasi hasil penelitian oleh dosen belum maksimal, pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran Swadana, terbatasnya dana yang dialokasikan untuk ceramah/diskusi dan seminar, rendahnya minat tenaga pengajar Universitas Jambi untuk mengusulkan hasil penelitiannya untuk mendapatkan HaKI, masih terbatasnya formasi yang diterima Universitas Jambi sehingga antara usulan dengan realisasinya jauh berbeda, sementara disisi lain pegawai Universitas Jambi telah banyak berkurang karena pensiun. Beberapa solusi yang bisa ditempuh antara lain; Mengusulkan alokasi dana cukup memadai untuk menunjang kegiatan Tridharma, Studi visit ke beberapa instansi pemerintah atau swasta dan beberapa lembaga internasional untuk mengadakan peninjauan kemungkinan kerjasama, Pembangunan Rumah sakit Pendidikan akan diusulkan kembali pada T.A 2015, Memfasilitasi tenaga pengajar

untuk mempublikasikan hasil penelitiannya, Memfasilitasi tenaga pengajar untuk mengusulkan Penelitiannya dalam mendapatkan HaKI.

6.3.4 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi melalui dana APBN dengan Program dan kegiatan a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, dan c) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.10
Pagu Anggaran Badan Pusat Statistik

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Keuangan	Fisik
2010	14.223.065.000	94,31	100
2011	14.464.341.000	98,77	100
2012	11.290.687.000	95,79	100
2013	11.452.694.000	97,06	100
2014	10.857.861.000	84,26	100

6.3.5 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi sebagai UPT Balai Karantina Pertanian pada Kementerian Pertanian sesuai amanah Undang-undang nomor 16 tahun 1992 bertugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani nabati, program kegiatan yang dibiayai oleh dana APBN tahun 2010-2014 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.11
Pagu Anggaran Balai Karantina Pertanian

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2010	5.176.960.000	14.325.824.427	97,17
2011	6.141.699.000	23.960.237.676	97,10
2012	7.223.438.000	21.835.985.491	97,60
2013	12.563.266.000	28.424.588.888	90,95
2014	30.533.779.000	25.059.716.978	82,07

6.3.6 BKKBN Provinsi Jambi

Pelaksanaan program dan kegiatan di BKKBN Provinsi Jambi yang dibiayai oleh dana APBN meliputi Program Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB, Provinsi dengan kegiatan antara lain Kegiatan Rancangan Induk pengendalian Penduduk Provinsi, Kegiatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Provinsi, Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi, Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, kegiatan Advokasi dan Penggerakan, Kegiatan Mitra Kerja Program Kependudukan dan KB, Kegiatan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB, Kegiatan SDM yang Terdidik dan Terlatih, Kegiatan Penelitian Kependudukan dan KB, Kegiatan Dukungan Manajemen BKKBN Provinsi, Kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Kependudukan dan KB, Kegiatan PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapat Dukungan Operasional, Kegiatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB di Lini Lapangan.

Tabel 6.12
Pagu Anggaran BKKBN Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2010	14.742.379.000	14.325.824.427	97,17
2011	24.676.931.000	23.960.237.676	97,10
2012	22.373.841.000	21.835.985.491	97,60
2013	31.254.342.000	28.424.588.888	90,95
2014	30.533.779.000	25.059.716.978	82,07

6.3.7 Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Realisasi program dan kegiatan diukur berdasarkan pencapaian kinerja sasaran strategis yang diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai TNBT Tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Tabel 6.13
Pagu Anggaran Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

No	Sasaran Strategis	Capaian (%)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Tahun 2010: Program Pemantapan Kemanan dalam Negeri (berkurangnya gangguan dan antisipasi ancaman kawasan hutan) Tahun 2011 – 2014: Tindak pidana bidang kehutanan dapat diturunkan sebesar 10% dari tahun 2009	82,73	102,19	74,17	79,06	80,00
2	Tahun 2010: Program perlindungan dan konservasi SDA (berkurangnya titik api di daerah rawan kebakaran) Tahun 2011 – 2014: Tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan di dalam dan disekitar kawasan TNBT	93,89	100,00	85,36	68,90	53,33
3	Tahun 2010: Program perlindungan dan konservasi SDA (terkelolanya kawasan dan kelembagaan taman nasional) Tahun 2011 – 2014: Terwujudnya kemantapan kawasan untuk mendukung pengelolaan SDAH dan E yang optimal	92,49	88,67	80,52	78,84	133,33
4	Tahun 2010: Program perlindungan dan konservasi SDA (meningkatnya PNBP melalui pengembangan aktivitas wisata alam) Tahun 2011 – 2014: Peningkatan dan pengembangan kegiatan pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam melalui kerjasama kolaboratif	92,99	85,18	82,07	84,64	65,28
5	Tahun 2010: Program perlindungan dan konservasi SDA (meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TN) Tahun 2011: Terlaksananya konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar Tahun 2012 – 2014: Terpantaunya dan dapat dipertahankan populasi endemik yang terdapat di dalam kawasan sebesar 50 % pada kawasan TNBT	97,40	100,00	86,95	95,28	70,83
6	Tahun 2010: Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik serta Program perlindungan dan konservasi SDA (terencananya dan terkendalinya pengelolaan taman nasional) Tahun 2011 – 2014: Meningkatkan efektivitas manajemen Balai TNBT	94,83	75,36	86,56	90,10	111,25
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis		92,39	91,90	82,60	82,81	85,67

Pelaksanaan Program dan kegiatan Balai TNBT pada tahun 2010-2014 menemui beberapa permasalahan dan kendala sehingga mempengaruhi target kinerja kegiatan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Permasalahan dan kendala tersebut adalah sebagai berikut:

Fungsi pemantauan belum optimal terhadap kegiatan yang berjalan sehingga pengambilan alternatif kegiatan lain untuk dituangkan dalam revisi anggaran tidak secara cepat dilaksanakan, penyusunan rencana kegiatan balai belum representatif dan belum menggambarkan kondisi riil di lapangan sehingga berdampak pada terjadinya akumulasi kegiatan menjelang akhir tahun anggaran, serta adanya interkoneksi kegiatan balai dengan instansi teknis terkait lain sehingga membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi yang intens.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi permasalahan yang sama pada tahun mendatang, maka pelaksanaan kegiatan harus memperkuat sistem manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dijalankan, perencanaan kedepan perlu membedakan antara kegiatan penting, prioritas dan mendesak, hal ini untuk menghindari terhambatnya pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis, pemantapan dalam penyusunan tata waktu pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan tipologi kawasan yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan manfaat kegiatan yang relevan dengan IKU serta IKK Renstra Direktorat Jenderal PHKA, penegasan dalam kedisiplinan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi diperlukan pada tahap awal penyusunan rencana kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan instansi terkait lain.

6.3.8 Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi

Pelaksanaan program pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jambi tahun 2010-2014 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dituangkan

kedalam DIPA Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tahun 2010 sampai 2014 seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.14
Pagu Anggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2010	9,459,928,000	8,862,498,592	93.68
2011	9,794,411,000	8,922,265,072	86.70
2012	12,184,082,000	10,604,615,095	87.37
2013	21,017,525,000	19,739,822,708	93.24
2014	15,453,756,000	12,289,503,783	87.02

6.3.9 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. PER/04/V/BNN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka BNN Provinsi Jambi mempunyai Tugas Pokok dalam melaksanakan Visi dan Misinya dalam melaksanakan program “Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba menuju Indonesia yang bebas Narkoba tahun 2015” , Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala BNN Provinsi Jambi di bantu oleh 4 (Empat) Kepala Bagian/Bidang.

Realisasi Kegiatan dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

Tabel 6.15
Pagu Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
2013	3.499.640.000	3.210.756.771	91,75
2014	2.904.891.000	2.776.060.832	95,57

Beberapa kendala yang masih dijumpai dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), antara lain masih kurangnya partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan, kurangnya

disiplin peserta kegiatan terhadap waktu/jadwal pelaksanaan kegiatan, kurangnya/lambatnya perhatian/respon pejabat di Pemerintahan di tingkat (kelurahan/kecamatan) untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat, kurangnya kesadaran dari penentu kebijakan di sekolah akan pentingnya informasi P4GN bagi seluruh anggota sekolah, sering timbulnya bencana lokal di daerah Provinsi Jambi (kabut asap, banjir) yang menyebabkan ketidاكلancaran pelaksanaan kegiatan, sebaran penduduk pada wilayah pemukiman yang luas menyebabkan sulitnya informasi tentang P4GN, infrastruktur jalan menuju lokasi pemetaan banyak yang rusak, masih dijumpai keterlibatan oknum/aparat TNI dan Polri didalam peredaran dan penggunaan narkoba selaku backing, senjata/perengkapan lapangan kurang, kerjasama personil dan saksi yang masih kurang dan gedung Kantor masih pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

6.4 Pembinaan Batas Wilayah

1) Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupabumi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama Rupabumi dan mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi, baik untuk kepentingan pembangunan regional maupun nasional. Besar anggaran dari kegiatan ini yaitu Rp169.403.250.-

Untuk kegiatan Pembinaan dan BinteK Pembakuan Nama Rupabumi terealisasi anggaran sejumlah Rp169.223.600.- atau 99,89% dan realisasi fisik 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu masih terdapatnya Pemerintah Kabupaten/kota belum maksimal dalam mendata nama Rupabumi yang ada di dalam wilayahnya. Jalan keluar yang perlu diambil antara lain meminta kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk lebih optimal dalam mendata nama Rupabumi yang ada di wilayahnya.

1) Kegiatan Penataan Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga

Tujuan dari kegiatan penataan batas antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga adalah untuk mencegah terjadinya konflik, tertatanya wilayah administrasi pemerintahan guna mengoptimalkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan

dan pelayanan umum. Pada Tahun 2014 alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp436.690.750.- dengan realisasi anggaran kegiatan sejumlah Rp420.804.300.- atau 96,36% dengan realisasi fisik 100%.

Permasalahan dalam Penataan Batas Daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga dari 5 Segmen batas daerah masih terdapat 3 (tiga) segmen Batas daerah yang belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu segmen batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan dan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk segmen batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 539 Km sudah tidak ada permasalahan lagi namun masih terdapat 2 (dua) titik batas daerah yang berada di Kecamatan Sungai Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Kecamatan Bayunglencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan perlu dilaksanakan verifikasi kembali.

Untuk segmen batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat sepanjang 258,5 Km untuk sub segmen batas antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Solok Selatan serta Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Pesisir Selatan sudah tidak terdapat permasalahan lagi, sedangkan untuk sub segmen batas antara Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Dharmasraya sudah disepakati, dan telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen PUM untuk penyelesaiannya. Dalam kesepakatan Rapat yang difasilitasi oleh Ditjen PUM diminta kepada masing-masing Provinsi untuk menyampaikan dokumen pendukung kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen PUM dan sampai saat ini pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk belum menyampaikan dokumen dimaksud.

Solusi yang perlu ditempuh antara lain penegasan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan Gubernur Jambi melalui Surat Gubernur Jambi Nomor S-136/286/SETDA.PEM-1.1/2014 tanggal 30 Januari 2014, telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diterbitkan Permendagri tentang batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan untuk verifikasi 2 (dua) titik batas daerah yang berada di Kecamatan Sungai Bahar Selatan

Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Kecamatan Bayunglencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan akan dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk Penegasan Batas Daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat Gubernur Jambi melalui Surat Nomor S-136/481/SETDA.PEM-1.1/2014 tanggal 28 Februari 2014, telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diterbitkan Permendagri tentang batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat dengan mengusulkan menetapkan Batas Daerah untuk sub segmen batas yang tidak ada permasalahan dan yang telah disepakati, dan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyelesaian untuk sub segmen batas daerah yang masih terdapat permasalahan.

2) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Tujuan dari kegiatan fasilitasi penyelesaian Batas antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi adalah untuk mencegah terjadinya konflik, tertatanya wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/kota guna mengoptimalkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum, alokasi anggaran Rp454.453.200.-realisasi anggaran kegiatan sejumlah Rp454.353.500.- atau 99,34% dengan realisasi fisik 100%.

Permasalahan yang dihadapi yakni segmen Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi terdapat 17 Segmen Batas, dalam penyelesaiannya batas daerah antar Kabupaten/Kota banyak faktor yang mempengaruhi di antaranya panjang garis batas, kultur budaya, historis, dukungan anggaran dan yang paling penting adanya kesepakatan serta tingkat pemahaman masyarakat dalam pentingnya penegasan batas daerah. Untuk panjang garis batas antar Kabupaten/Kota hampir seluruhnya sudah di ukur namun ada beberapa sub segmen batas atau titik batas yang belum disepakati antar kabupaten/kota yang berbatasan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.16
Penegasan Batas Antar Kabupaten/Kota
Dalam Provinsi Jambi Keadaan S.D Desember 2014

NO	SEGMENT BATAS KAB/KOTA	PANJANG		KETERANGAN
		SEGMENT BATAS	BELUM SEPAKAT	
1	2	3	4	5
1	KOTA JAMBI - MUARO JAMBI	70,40	-	Proses PMDN
2	MUARO JAMBI - BATANGHARI	156,00	30,00	
3	MUARO JAMBI - TANJAB TIMUR	160,00	20,00	
4	TANJAB BARAT - MUARO JAMBI	44,00	-	
5	TANJAB BARAT - TANJAB TIMUR	66,00	2,40	Simpul batas
6	TEBO - TANJAB BARAT	43,10	-	PERMENDAGRI Nomor 62 Tahun 2014
7	TEBO - BATANGHARI	85,00	10,00	75 km blm diukur
8	BATANGHARI - SAROLANGUN	128,00	-	Proses PMDN
9	TANJAB BARAT - BATANGHARI	72,60	-	Proses PMDN
10	BUNGO - TEBO	138,50	40,20	
11	BUNGO - MERANGIN	156,56	-	Proses PMDN
12	MERANGIN - SAROLANGUN	188,54	15,00	
13	MERANGIN - TEBO	55,30	6,00	
14	KERINCI - BUNGO	33,00	-	Proses PMDN
15	KERINCI - MERANGIN	105,68	-	Proses PMDN
16	KERINCI - SUNGAI PENUH	130,00	10,00	102 blm diukur
17	SAROLANGUN - TEBO	5,00	-	
JUMLAH (KM)		1.637,68	135,60	179 Km blm diukur
PERSENTASE (%)		100,00	8,28	

Dalam mempercepat penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota, perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penegasan batas daerah dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk lebih optimal dalam pelaksanaan penegasan batas daerah dan dalam penegasan batas daerah harus berlandaskan dalam kerangka NKRI.

6.5 Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan

dampak psikologis. Pengertian tersebut terdapat didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari Pembangunan Nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum (prabencana), pada saat tanggap darurat, maupun sesudah terjadi bencana (pasca bencana). Melalui perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik dimaksudkan dapat memberi landasan hukum yang kuat dalam merumuskan kegiatan kebencanaan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga diperoleh hasil optimal dalam melaksanakan aksi pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Sebab itu Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Provinsi Jambi merupakan suatu provinsi yang secara geografis terletak pada daerah pegunungan (Gunung Kerinci) sebagai gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan pasang surut Pantai Timur Sumatera. Dengan luas wilayah 53.435 Km², yang terdiri dari daratan 51.000 Km², perairan 2.435 Km² dengan panjang pantai 185 Km, Provinsi Jambi berpenduduk 3.088.618 orang yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 138 Kecamatan dan 1.391 Desa dan 162 Kelurahan.

Dari kondisi tersebut diatas, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo rawan terhadap Gempa Tektonik dan Vulkanik. Sedangkan banjir terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di semua kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari terdapat lebih dari 244 desa termasuk daerah rawan dan berpotensi banjir. Meliputi kawasan pertanian dan pemukiman masyarakat diperkirakan seluas 180.305 Ha. (Data Dep Kimpraswil 2006)

Dari luas ini, 78 % merupakan daerah pemukiman sedangkan daerah rawan longsor lebih banyak terdapat di daerah hulu DAS Batang Hari. Daerah rawan longsor diantaranya Lintasan Danau Diatas – Lubuk Gadang, seperti daerah Air Dingin, Gunung Rasam, Patal, Sebelah selatan Bukit Buayan. Gunung Kerinci dan sekitarnya, Selatan Bukit Simpang, Bukit Lintang dan selatan Bukit Basunglolo, juga merupakan daerah rawan longsor. Daerah rawan lainnya adalah Daerah Danau Kerinci, yaitu daerah Pungut Mudik, sebelah Timur Bukit Pandan, Pulau Sangkar. Di perbatasan Kerinci dengan Merangin juga terdapat daerah yang rawan longsor yaitu Lintasan Danau Daerah Pondan Lapanggar, Lubuk Telung sebelah timur Bukit Sungai Kuyut. Sedangkan di Kabupaten Merangin daerah rawan longsor terdapat di daerah Bukit Maras, Bukit Pungung, Bukit Telanti dan Sikancing.

Selain bencana alam, seperti gempa, banjir dan tanah longsor, Provinsi Jambi berpotensi terhadap bencana sosial seperti kebakaran hutan, lahan perkebunan, kebakaran pemukiman, wabah penyakit dan kerusuhan sosial. Berdasarkan data dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi tahun 2006 terdapat 100 Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi, kejadian bencana menunjukkan bahwa bencana banjir menempati peringkat pertama dan diikuti oleh kebakaran pemukiman, serangan hama tanaman, kekeringan, kebakaran hutan/kawasan, wabah penyakit menular, kerusuhan antar desa dan longsor.

Dalam penanggulangan bencana, masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/hunian sementara. Hal-hal tersebut akan dapat berjalan baik dengan terbentuknya koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan kerjasama yang baik dari instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Pada saat terjadinya bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam

penanggulangan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya , otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sehubungan hal tersebut diatas dalam upaya untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan serta mengintegrasikan program kegiatan untuk penanggulangan bencana Provinsi Jambi telah membentuk badan yang mengkoordinir tentang bencana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi Tanggal 10 Agustus 2009 yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. Yang mana keberadaannya menjadi wahana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, membangun sistim penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, hal tersebut sesuai dengan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2014, melalui APBD Provinsi Jambi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.236.088.661,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.756.049.338,- atau serapan sebesar 88,67 % dengan program dan kegiatan sebagaimana tergambar pada table dibawah ini.

Tabel 6.17
Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2014

Program/Kegiatan Per Bidang	Realisasi		
	Anggaran	Keuangan	%
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.118.225.700	1.022.523.938	91,44
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	62.600.000	60.641.870	96,87
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik.	317.140.100	254.687.666	80,31
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	70.368.000	69.818.000	99,22
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	85.000.000	85.000.000	100
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	89.199.600	87.565.100	98,17
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.000.000	19.000.000	100
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	15.000.000	14.842.000	98,95
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	40.800.000	13.955.300	34,2
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluarDaerah.	419.118.000	417.014.002	99,5

2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dari pelaksanaan program dan kegiatan ini telah memberikan dampak terhadap penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana yang meliputi :

1. Terwujudnya penyusunan dan pelaporan penanggulangan bencana serta kesamaan, sinergisitas program dan kegiatan kebencanaan Pemerintah Kab/kota se Provinsi Jambi melalui kegiatan Rapat Perencanaan Bidang Kebencanaan Program Kegiatan serta Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Penanggulangan Bencana.

2. Adanya program kerjasama penanggulangan bencana (PB) daerah Provinsi Jambi terwujud koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana di Provinsi Jambi yang telah diimplementasikan melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014.

3. Dalam mengimplementasikan program penghimpunan data dan informasi pembangunan daerah telah terlaksana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana bertempat di Kelurahan Pauh Kabupaten Sarolangun.

4. Demi terwujudnya penanganan darurat dan logistic secara cepat, tepat, efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana telah dilaksanakan dan didukung dengan pemantapan penguatan kemampuan personil Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari Kab/Kota se Provinsi Jambi, dalam penanganan darurat di Provinsi Jambi juga dilakukan rapat koordinasi penguatan logistik secara kontinue berjumlah 40 orang dari BPBD/Kesbangpol linmas se Provinsi Jambi.

5. Dalam upaya membangun sistim informasi, komando dan koordinasi penanggulangan bencana melalui program pembinaan penanganan darurat dan logistic telah dilakukan kegiatan pendukung operasional penyelenggaraan Pusdalops PB (Pusat pengendalian operasional Penanggulangan Bencana) melalui pelatihan pemantapan manajemen Pusdalops dengan melibatkan unsur dari BPBD Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi berjumlah 35 orang.

6. Sebagai bentuk realisasi program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (pascabencana) telah dilakukan kegiatan penyusunan aktualisasi data dan sinkronisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga tersusun data kerusakan fasilitas umum, social dan infrastruktur pascabencana dan terselenggaranya rakor bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

7. Selanjutnya untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur dan kapasitas sumber daya aparatur merupakan kegiatan rutinitas dalam mendukung kinerja aparatur pemerintahan.

Secara umum kondisi kebencanaan di Provinsi Jambi dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 kejadian bencana terjadi sebanyak 110 kali kejadian yang tersebar di seluruh Kab/Kota dalam Provinsi

Jambi baik itu kejadian kebakaran, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung.

Pengumpulan data kejadian bencana tidak terlepas dari partisipatif aktif dari berbagai pihak, baik di BPBD instansi terkait di Kab/Kota. Pusdalops PB BPBD Provinsi Jambi melakukan verifikasi dan validasi data kebencanaan dengan BPBD di Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan tersebut, diperoleh kumpulan data kejadian bencana yang semakin lengkap. Pada tahun 2014 dari 110 kejadian, kebakaran mendominasi kejadian bencana yaitu sebanyak 92 kejadian kebakaran, bencana banjir sebanyak 14 kejadian, bencana tanah longsor 1 kejadian dan angin puting beliung sebanyak 3 kejadian. Selama bulan Januari – Desember 2014 tercatat 110 kejadian bencana, kejadian bencana terbanyak berada di Kota Jambi sebanyak 51 kejadian. Dapat dilihat pada **Tabel 6.18**

Tabel 6.18
Kabupaten/Kota yang mengalami Kejadian Bencana Paling Banyak Selama Bulan Januari – Desember 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana
1.	Kabupaten Bungo	5
2.	Kota Jambi	51
3.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	12
4.	Kabupaten Merangin	4
5.	Kabupaten Kerinci	1
6.	Kabupaten Tebo	5
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	19
8.	Kabupaten Muaro Jambi	8
9.	Kabupaten Batanghari	1
10.	Kabupaten Sarolangun	1
11.	Kota Sungai Penuh	3
	T o t a l	110

Bencana yang terjadi selama bulan Januari – Desember 2014, telah mengakibatkan timbulnya korban dan kerusakan yang tidak sedikit. Kebakaran merupakan bencana yang paling dominan terjadi pada bulan Januari – Desember 2014 di Provinsi Jambi. Data rekapitulasi bencana bulan Januari – Desember 2014 berdasarkan jenis bencana, jumlah kejadian, korban dan rumah rusak.

Tabel 6.19
Rekapitulasi Kejadian Bencana Paling Banyak Di Provinsi Jambi
Periode Januari s/d Desember 2014

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Bencana	Manusia Meninggal	Manusia Luka Berat	Korban Jiwa			Terendam
					Rumah Rusak Total	Rumah Rusak Berat	Rusak Ringan	
1.	Kebakaran	58	2 org	-	115	39	13	-
2.	Kebakaran lahan tidur	34	-	-	-	-	-	-
3.	Banjir	13	2 org	-	-	-	-	584
4.	Banjir bandang	1	-	-	-	-	-	-
5.	Tanah Longsor	1	-	-	-	1	-	-
6.	Angin Puting Beliung	3	1org	1 org	-	12	67	-
Total		110	5 org	1 org	115	52	80	584

Sedikitnya jumlah korban ini tidak terlepas dari peran serta instansi terkait dan sumber daya manusia sebagai pelaku penanggulangan bencana yang semakin meningkat serta dukungan pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang semakin efektif baik dalam hal kebijakan maupun prosedur operasional secara koordinatif. Selain itu juga meningkatnya pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana akan mengurangi resiko bencana.

2. KORBAN

Korban kejadian bencana kebakaran, kebakaran lahan tidur, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung yang menelan korban jiwa yaitu kebakaran, banjir dan angin puting beliung

a. Meninggal; dari 6 (enam) jenis kejadian bencana yang terjadi selama bulan Januari – Desember 2014 kebakaran, banjir dan angin puting beliung menimbulkan korban jiwa 5 orang.

b. Adapun selama bulan Januari-Desember 2014 tidak ada yang mengungsi.

3. KERUSAKAN

Kerusakan yang terjadi pada bulan Januari – Desember 2014 selain menimbulkan korban juga mengakibatkan kerusakan rumah penduduk maupun sarana dan prasarana umum. Selama bulan Januari-Desember 2014, rumah penduduk yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat serta rusak total sebanyak 247 unit. Dari jumlah kerusakan tersebut, bencana kebakaran menimbulkan kerusakan rumah penduduk paling banyak dari bulan Januari s/d Desember 2014 sebanyak 167 unit.

4. KORBAN DAN KERUSAKAN BERDASARKAN JENIS BENCANA

a. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salahsatu gerakan massa tanah atau batuan, atau campuran keduanya, yang menurun atau keluar dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi (terutama kemiringan lereng), kondisi batuan atau tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan/tanah dan tata air, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu

kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu longsor. Selama bulan Januari-Desember 2014, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Merangin.

b. Banjir

Kemampuan atau daya tampung dari satu system pengaliran air tidak selamanya sama. Perubahan daya tampung dapat terjadi akibat sedimentasi, penyempitan sungai atau tersumbat sampah. Penggundulan hutan atau perubahan fungsi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) juga dapat menyebabkan peningkatan debit banjir karena air yang masuk kedalam sistem aliran menjadi tinggi. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air terutama pada daerah pemukiman yang padat dengan bangunan, jika terjadi hujan dengan curah yang tinggi dapat mengakibatkan meningkatnya volume air yang masuk kedalam sistem sungai sehingga kapasitasnya melampaui dan mengakibatkan banjir. Bencana banjir yang terjadi pada bulan Januari – Desember 2014 terjadi sebanyak 14 kali. Banjir yang terparah terjadi di Kabupaten Merangin sebanyak 1 kali.

c. Angin Topan

Angin topan merupakan pusaran angin kencang dan sering terjadi diantara garis balik utara dan selatan. Angin kencang ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin kencang yang terjadi di daerah tropis dapat mencapai kecepatan 120 Km/jam atau lebih dan umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer disekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim. Indonesia bukan merupakan daerah lintasan angin cyclone tropis, oleh karena itu akibat bencana yang ditimbulkan oleh angin kencang tersebut tidak terlalu besar. Meskipun jumlah kejadian bencana Angin Putting Beliung/Angin Topan sedikit di Bulan Januari-Desember 2014 sebanyak 3 kejadian, tetapi menimbulkan kerusakan yaitu 79 unit rumah terdiri dari rusak berat 12 unit, rusak ringan 67 unit dan mengakibatkan meninggal dunia 1 orang dan korban luka berat 1 orang.

d. Kebakaran

Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda api sehingga menimbulkan korban dan kerugian. Bangunan tersebut antara lain

rumah/permukiman, kantor, kios, lahan tidur dan bangunan lain. Berdasarkan laporan selama bulan Januari-Desember 2014, bencana kebakaran di Provinsi Jambi sebanyak 92 kejadian yang tersebar di Kabupaten/Kota. Kota Jambi sebanyak 46 kejadian, Kota Sungai Penuh sebanyak 2 kejadian, Kabupaten Bungo sebanyak 4 kejadian, Kabupaten Tanjab Barat sebanyak 13 kejadian, Kabupaten Kerinci sebanyak 1 kejadian, Kabupaten Tanjab Timur sebanyak 18 kejadian dan Kabupaten Tebo sebanyak 1 kejadian.

5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi masih ditemui permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Masih kurang terpadunya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berjalan secara sektoral dan perlu pembenahan dan perbaikan secara bertahap.
- 3) Tenaga profesional penanggulangan bencana masih kurang.
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Sebagai bentuk mengantisipasi permasalahan telah dilakukan upaya dan solusi sebagai berikut:

- 5) Peningkatan anggaran kebencanaan setiap tahunnya disesuaikan dengan beban tugas BPBD.
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya dan pelayanan aparatur yang handal dan tangguh melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan kebencanaan.
- 7) Meningkatkan koordinasi baik tingkat Pusat maupun Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan peran dan fungsi BPBD Provinsi Jambi.

6.6 Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 255 lebih rinci mengatur tentang kewenangan Polisi Pamong Praja, selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

b. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Pada tahun anggaran 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi memperoleh alokasi anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp.9.316.275.000,00 yang digunakan untuk membiayai 13 program dengan 41 kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut terdiri dari Program pelayanan administrasi perkantoran (sembilan kegiatan), Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (delapan kegiatan), Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (satu kegiatan), Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi keuangan (satu kegiatan), program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (delapan kegiatan), Program pengembangan wawasan kebangsaan (satu kegiatan), Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan (satu kegiatan), Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (empat kegiatan), Program pengendalian banjir (dua kegiatan), Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (satu kegiatan), Program Kelembagaan dan koordinasi (satu kegiatan). Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 8.532.790.888,00 atau sebesar 91,59 %.

c. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam upaya penanggulangan terjadinya masalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja, telah dilakukan berbagai upaya meliputi;

1. Melakukan pendataan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Mapping potensi gangguan)
2. Melakukan pembinaan.
3. Memberikan peringatan dan teguran atas pelanggaran.
4. Melakukan kegiatan razia dan penertiban.

Dalam setiap penanganan aksi unjuk rasa/demonstrasi, dilakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, serta Kepolisian, namun demikian berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Daerah, ketertiban dan ketentraman umum, perlindungan kepada masyarakat, serta penyuluhan dan operasi penyakit masyarakat (PEKAT).

d. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama pihak keamanan, dengan terjalinnya kerjasama tersebut dapat terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif, aman dan tertib, sehingga pada tahun 2014 ini Provinsi Jambi memperoleh Penghargaan dari Menkopolhukam dalam hal ***Penanganan Gangguan Dalam Negeri*** (PGKDN) terbaik pertama (1) predikat Provinsi Teraman di Sumatera dan urutan terbaik tiga (3) teraman secara Nasional.